

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi berdasarkan perspektif *fraud hexagon*. Terdapat tujuh variabel yang menjadi objek pada penelitian ini, di antaranya yaitu korupsi sebagai variabel dependen (Y) serta enam variabel independen (X) yakni, *stimulus*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego*. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah provinsi se-Indonesia. Berdasarkan objek penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, khususnya pada pemerintah provinsi.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah *blue print* atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Menurut Sekaran & Bougie (2016) tidak ada satu desain penelitian pun yang unggul dalam segala bentuk penelitian. Tapi kualitas desain penelitian diukur dari seberapa tepat suatu alat yang digunakan dalam penelitian dengan mempertimbangkan tujuan, rumusan masalah, dan keterbatasan penelitian.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Menurut Suharsaputra (2015) penelitian kuantitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data numerik. Pendekatan asosiatif kausal bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti yang empiris atas pola hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif dikatakan sesuai untuk mengetahui keadaan atau gejala-gejala tertentu seperti faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu ataupun untuk menguji hipotesis tentang keberpengaruhannya suatu variabel. Pendekatan ini juga biasa digunakan jika penelitian dilakukan untuk memverifikasi teori yang telah ada (Ridwan, 2016). Maka pendekatan kuantitatif dinilai tepat untuk penelitian ini karena digunakan

untuk mengetahui keberpengaruhannya suatu variabel sekaligus memverifikasi teori yang telah ada, yakni teori keagenan dan teori *fraud hexagon*.

3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Objek pada penelitian ini tidak dapat secara langsung diukur, sehingga diperlukan pengukuran karakteristik atau atribut objek. Pengukuran adalah penetapan angka atau simbol untuk karakteristik objek menurut seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2016). Perlu operasionalisasi variabel untuk mereduksi gagasan variabel menjadi karakteristik yang dapat diukur dan diamati. Pada penelitian ini, penulis akan menguji enam variabel independen dan satu variabel dependen yang bisa dijelaskan sebagai berikut.

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sekaran dan Bougie (2016) variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen juga biasa disebut sebagai variabel terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel lain. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah korupsi karena merupakan salah satu bentuk *fraud* yang banyak terjadi pada pemerintahan atau sektor publik. Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada penelitian ini korupsi diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 diberikan untuk pemerintah provinsi dengan kasus korupsi dan nilai 0 diberikan untuk pemerintah provinsi yang tidak terdapat kasus korupsi di tahun yang bersangkutan. Dengan rentang penelitian di tahun 2019-2021.

2. Variabel Independen (X)

Sekaran dan Bougie (2016) mendefinisikan variabel independen sebagai sesuatu yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Variabel independen pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi menurut *fraud hexagon* yang mana

jumlahnya ada enam faktor, yaitu *stimulus*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego*.

a. *Stimulus*

Stimulus atau tekanan merupakan dorongan pemikiran melakukan *fraud* sebagai solusi dari suatu permasalahan (Cressey, 1950). Menurut Maria et al. (2018) faktor *stimulus* pada pemerintah daerah dapat dilihat dari kemandirian suatu daerah. Kondisi daerah yang mandiri secara keuangan menekan terjadinya korupsi. Kemandirian daerah diukur dengan rasio sebagai berikut.

$$PADEXP = \frac{\Sigma \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\Sigma \text{Belanja Daerah}}$$

b. *Capability*

Capability adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Wolfe dan Hermanson 2004). Variabel *capability* diukur dengan masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah dapat menjabat paling lama 2 periode. Dalam penelitian ini digunakan variabel dummy, yaitu 1 untuk kepala daerah yang sebelumnya pernah menjabat kepala daerah dan 0 untuk kepala daerah yang baru menjabat sebagai kepala daerah. Semakin lama menjabat, maka semakin besar kemampuan kepala daerah melakukan korupsi karena sudah memahami kelemahan-kelemahan pengendalian internal dalam suatu daerah (Maria, 2019).

$$PJ = \text{Periode Jabatan}$$

c. *Collusion*

Collusion merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi yang menguntungkan diri mereka sendiri atau suatu kelompok tertentu. Mauro (1998) menemukan bahwa *fraud* di pemerintah daerah dapat dengan mudah dilakukan dan disembunyikan pada kegiatan belanja modal. Belanja modal di pemerintah daerah terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik

lainnya. Semakin besar jumlah belanja modal, maka semakin besar juga kemungkinan kepala daerah melakukan korupsi dengan cara berkolusi dengan pengusaha (Maria, 2019). Untuk menghindari variabilitas data yang tinggi, maka data belanja modal akan ditransformasi ke dalam bentuk natural logaritma.

$$BM = Ln (\text{Jumlah belanja modal pemerintah daerah})$$

d. *Opportunity*

Opportunity dapat dijelaskan sebagai sebuah keadaan, celah dan kesempatan yang diyakini oleh pelaku bahwa tindakan kecurangannya tidak akan terdeteksi biasanya karena lemahnya pengendalian internal. Lemahnya pengendalian internal dapat dilihat dari temuan SPI tahun sebelumnya yang memiliki keterikatan dengan temuan tahun berikutnya (Maria, 2019). Sehingga dalam penelitian ini, *opportunity* dapat diukur dengan jumlah temuan kelemahan SPI pemerintah daerah di tahun audit sebelumnya.

$$TSPI = \text{Jumlah temuan SPI tahun sebelumnya}$$

e. *Rationalization*

Cressey (1950) mendefinisikan *rationalization* (rasionalisasi) sebagai alasan yang dibuat oleh individu untuk melakukan pembenaran terhadap tindakan yang menyimpang/ilegal. Pegawai menerima gaji atau kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah mengenai pengupahan merupakan salah satu bentuk rasionalisasi untuk membenarkan tindakan korupsi yang dilakukan (Wicaksono & Prabowo, 2022; (Muhtar et al., 2018). Sehingga dalam penelitian ini, *rationalization* diukur dengan perbandingan belanja pegawai daerah dengan total pengeluaran daerah.

$$BPEXP = \frac{\Sigma \text{Belanja Pegawai}}{\Sigma \text{Belanja Daerah}}$$

f. *Ego*

Ego merupakan salah satu proses mental yang mendorong seorang perilaku kriminal melakukan *fraud* (Vousinas, 2019). Seseorang dengan ego yang besar akan bersikap merasa benar dalam segala situasi. Sikap ego yang

besar dapat dilihat dari jumlah tanggapan *auditee*, dalam hal ini pemerintah daerah, atas hasil pemeriksaan BPK. Jumlah tanggapan *auditee* berpengaruh positif terhadap korupsi (Muhtar et al., 2018). Semakin besar ego *auditee* maka semakin banyak jumlah tanggapan *auditee* dalam menolak temuan dari auditor. Maka dalam penelitian ini faktor *ego* diukur dengan banyaknya tanggapan *auditee* atas temuan BPK.

$$\text{TAUDT} = \text{Jumlah tanggapan } \textit{auditee} \text{ atas temuan BPK}$$

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Pengambilan sampel dimulai dengan menentukan populasi sasaran secara tepat dan harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu (Sekaran & Bougie, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi se-Indonesia yang berjumlah 38 provinsi di tahun 2019-2021. Pemerintah provinsi dipilih sebagai populasi penelitian karena berdasarkan data penelitian ICW, pemerintah daerah menjadi sorotan sebagai lembaga yang paling dominan terjadi kasus korupsi. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk urusan keuangan daerah (Nuruddin & Rahmawati, 2021). Telah banyak penelitian-penelitian yang menganalisis penyebab korupsi di pemerintah kabupaten/kota, namun penelitian pada pemerintah provinsi masih sangat minim. Padahal pemerintah provinsi merupakan pembina/koordinator dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota (Apriastanti & Widajantie, 2022). Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah provinsi dapat mewakili pemerintah daerah di Indonesia. Rentang tahun 2019-2021 juga dipilih karena menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) kesuksesan sebuah negara dalam mengatasi korupsi bergantung pada sikap politik pemimpin bangsanya, sehingga rentang waktu kepemimpinan Presiden Joko Widodo dipilih pada penelitian ini.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi. Pada penelitian ini dilakukan teknik *purposive sampling* untuk menyeleksi sampel dari populasi. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel yang terbatas pada jenis subjek tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena hanya mereka yang memiliki informasi, atau karena subjek tersebut memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2016). Penulis pada penelitian ini menerapkan beberapa kriteria untuk pemilihan sampel sebagai berikut.

1. Pemerintah provinsi yang telah berdiri dan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal dari tahun 2019-2021
2. Pemerintah provinsi yang LKPD-nya telah diperiksa oleh BPK
3. Data mengenai variabel penelitian yang diteliti lengkap

Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Pemerintah provinsi di Indonesia	38
2	Pemerintah provinsi yang berdiri sejak lebih dari tahun 2019	(4)
Jumlah pemerintah provinsi yang menjadi sampel		34
Jumlah data dalam penelitian (3 tahun)		102

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka dihasilkan jumlah sampel pemerintah provinsi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 34 pemprov. Penelitian ini dilakukan pada periode 2019-2021 sehingga menghasilkan 102 data penelitian. Berikut daftar pemerintah provinsi yang menjadi sampel penelitian ini.

Tabel 3. 2 Daftar Sampel Penelitian

No	Pemerintah Provinsi	Singkatan
1	Provinsi Aceh	Aceh
2	Provinsi Sumatera Utara	Sumut
3	Provinsi Sumatera Barat	Sumbar
4	Provinsi Riau	Riau

No	Pemerintah Provinsi	Singkatan
5	Provinsi Jambi	Jambi
6	Provinsi Sumatera Selatan	Sumsel
7	Provinsi Bengkulu	Bengkulu
8	Provinsi Lampung	Lampung
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Babel
10	Provinsi Kepulauan Riau	Kepri
11	Provinsi DKI Jakarta	Jakarta
12	Provinsi Jawa Barat	Jabar
13	Provinsi Jawa Tengah	Jateng
14	Provinsi D.I. Yogyakarta	DIY
15	Provinsi Jawa Timur	Jatim
16	Provinsi Banten	Banten
17	Provinsi Bali	Bali
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	NTB
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	NTT
20	Provinsi Kalimantan Barat	Kalbar
21	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalteng
22	Provinsi Kalimantan Selatan	Kalsel
23	Provinsi Kalimantan Timur	Kaltim
24	Provinsi Kalimantan Utara	Kaltara
25	Provinsi Sulawesi Utara	Sulut
26	Provinsi Sulawesi Tengah	Sulteng
27	Provinsi Sulawesi Selatan	Sulsel
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sultra
29	Provinsi Gorontalo	Gorontalo
30	Provinsi Sulawesi Barat	Sulbar
31	Provinsi Maluku	Maluku
32	Provinsi Maluku Utara	Malut
33	Provinsi Papua	Papua

No	Pemerintah Provinsi	Singkatan
34	Provinsi Papua Barat	Pabar

Sumber: Data olahan (2023)

3.4 Teknik dan Sumber Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada, baik itu dalam bentuk data digital ataupun data fisik. Pada penelitian ini data diperoleh dari publikasi pemerintah dan informasi lainnya yang dipublikasikan secara *online*. Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk menambah pemahaman penulis mengenai penelitian yang akan dilakukan terutama variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kualitas tinjauan literatur bergantung pada pemilihan dan pembacaan buku, jurnal akademis, laporan, tesis, prosiding konferensi dan sejenisnya (Sekaran & Bougie, 2016). Maka penulis dengan hati-hati memilih sumber-sumber literatur yang kredibel berupa artikel penelitian, laporan, juga disertasi yang dipublikasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melihat data yang telah tersedia. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Pemerintah Provinsi periode 2019-2021, website masing-masing pemerintah daerah, dan laporan di website KPK.

3.5 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu analisis data deskriptif dan analisis regresi logistik. Program yang digunakan dalam perhitungan dan pengolahan data adalah IBM SPSS Statistics 26.

3.5.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian yang mencakup beberapa variabel, sebelum mencari tahu keterkaitan antar variabel, perlu dilakukan analisis deskriptif. Menurut Sekaran & Bougie (2016) ada tiga ukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, dan modus. Selain itu, ada ukuran dispersi untuk mengetahui variabilitas sampel yang meliputi jangkauan, standar deviasi, dan varians. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan. Variabel penelitian ini yaitu *stimulus*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, *ego*, dan *fraud* akan diukur pada alat ukur statistik sebagai berikut.

1. Mean adalah nilai rata-rata yang mengukur tendensi sentral dan memberikan gambaran umum data.
2. Median adalah item sentral atau nilai tengah pada sekelompok data yang telah disusun dalam urutan naik atau menurun.
3. Modus adalah fenomena atau datum yang paling sering terjadi.
4. Jangkauan adalah nilai ekstrim atau nilai yang paling rendah dan paling tinggi dalam sekelompok data.
5. Standar deviasi adalah ukuran dispersi yang menyajikan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data.

3.5.1.2 Analisis Regresi Logistik

Menurut Sekaran & Bougie (2016) regresi logistik digunakan jika variabel dependen hanya memiliki dua kemungkinan, atau biasa disebut sebagai variabel dummy. Begitu pun pada penelitian ini, variabel dependen, yakni korupsi, diukur dengan nilai 1 jika ada kasus korupsi pada pemerintah provinsi dan nilai 0 jika tidak ada kasus korupsi pada pemerintah provinsi tersebut. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya korupsi dapat diprediksi oleh variabel independennya (*stimulus*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego*). Model persamaan regresi logistik pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

$$\log \frac{P}{1-P} = \alpha + \beta_1(\text{PADEXP}) + \beta_2(\text{PJ}) + \beta_3(\text{BM}) + \beta_4(\text{TSPI}) + \beta_5(\text{BPEXP}) + \beta_6(\text{TAUDT}) + e$$

Keterangan:

P	: Probabilitas terjadinya korupsi
α	: Konstanta
β	: Koefisien determinasi
PADEXP	: Kemandirian Daerah (<i>Stimulus</i>)
PJ	: Periode Jabatan (<i>Capability</i>)
BM	: Belanja Modal (<i>Collusion</i>)
TSPI	: Temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya (<i>Opportunity</i>)
BPEXP	: Belanja Pegawai (<i>Rationalization</i>)
TAUDT	: Tanggapan Auditee (<i>Ego</i>)

Analisis regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas data pada variabel independennya. Sehingga analisis ini tidak memerlukan asumsi-asumsi klasik yang ketat, namun tetap dapat menghasilkan prediksi seperti analisis regresi linear. Menurut Ghozali (2018) ada beberapa tahap penilaian dalam analisis regresi logistik, di antaranya sebagai berikut.

a. Menilai Model Fit (*Overall Fit Test Model*)

Pengujian ini dilakukan untuk menilai keseluruhan model terhadap data yang didapatkan, apakah model yang ada telah fit atau tidak dengan data. Hipotesis pada uji ini menurut Ghozali (2018) adalah:

H_0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data.

H_1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

Berdasarkan hipotesis tersebut, agar model diterima maka H_0 tidak boleh ditolak. Fungsi likelihood digunakan untuk menguji tahap ini. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data yang diinput. L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Untuk dapat menilai keseluruhan model dengan Log likelihood value, dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai $-2\text{Log}L$ satu yaitu model yang

memasukan konstanta dan nilai -2LogL dua yaitu model yang memasukan konstanta dan variabel bebas.

b. Estimasi Parameter dan Interpretasinya (*Nagelkerke's R Square*)

Ghozali (2018) menyatakan uji *Nagelkerke R'Square* adalah uji yang merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R Square*. Koefisien tersebut merupakan ukuran seperti R Square yang didasarkan pada Teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari satu. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R Square* dengan nilai maksimumnya. Nilai *Nagelkerke R'Square* dapat diinterpretasikan seperti nilai R Square pada multiple regresion. Nilainya bervariasi antara 0 sampai 1. Uji *Nagelkerke R'Square* digunakan untuk mengukur berapa besar kemampuan model atau variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

c. Menilai Kelayakan Model Regresi

Dalam menilai kelayakan model, analisis regresi logistik menggunakan pengujian *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit*. Menurut Ghozali (2018) *Hosmer and Lemeshow's Godness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model dalam kata lain tidak ada perbedaan antara model dan data sehingga model dapat dikatakan fit. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, artinya terdapat perbedaan signifikan antara model dan nilai observasi sehingga model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Sedangkan jika nilainya adalah lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 0 diterima sehingga model tersebut mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini uji hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *stimulus*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego* terhadap korupsi. Pada penelitian ini (H_0) merupakan hipotesis yang memiliki arti tidak adanya pengaruh antara variabel X terhadap Y. Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif (H_1). Pada penelitian ini (H_1) merupakan hipotesis yang memiliki arti adanya pengaruh variabel X terhadap Y. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hipotesis Penelitian 1 (*Stimulus* berpengaruh positif terhadap korupsi)
 - $H_0: \beta_1 = 0$ *Stimulus* tidak berpengaruh positif terhadap korupsi
 - $H_1: \beta_1 < 0$ *Stimulus* berpengaruh positif terhadap korupsi
2. Hipotesis Penelitian 2 (*Capability* berpengaruh positif terhadap korupsi)
 - $H_0: \beta_2 = 0$ *Capability* tidak berpengaruh positif terhadap korupsi
 - $H_1: \beta_2 > 0$ *Capability* berpengaruh positif terhadap korupsi
3. Hipotesis Penelitian 3 (*Collusion* berpengaruh positif terhadap korupsi)
 - $H_0: \beta_3 = 0$ *Collusion* tidak berpengaruh positif terhadap korupsi
 - $H_1: \beta_3 > 0$ *Collusion* berpengaruh positif terhadap korupsi
4. Hipotesis Penelitian 4 (*Opportunity* berpengaruh positif terhadap korupsi)
 - $H_0: \beta_4 = 0$ *Opportunity* tidak berpengaruh positif terhadap korupsi
 - $H_1: \beta_4 > 0$ *Opportunity* berpengaruh positif terhadap korupsi
5. Hipotesis Penelitian 5 (*Rationalization* berpengaruh negatif terhadap korupsi)
 - $H_0: \beta_5 = 0$ *Rationalization* tidak berpengaruh negatif terhadap korupsi
 - $H_1: \beta_5 < 0$ *Rationalization* berpengaruh negatif terhadap korupsi
6. Hipotesis Penelitian 6 (*Ego* berpengaruh positif terhadap korupsi)
 - $H_0: \beta_6 = 0$ *Ego* tidak berpengaruh positif terhadap korupsi
 - $H_1: \beta_6 > 0$ *Ego* berpengaruh positif terhadap korupsi

3.5.1.3 Uji Wald

Uji hipotesis parsial dalam regresi logistik dapat diuji dengan uji *wald*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau secara individu mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Ketentuan pengambilan keputusan dalam uji *wald* ini adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Kriterianya sebagai berikut.

- a. Jika nilai t hitung $< t$ tabel maka H_1 ditolak, artinya variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka H_1 diterima, artinya variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam uji signifikan regresi adalah:

1. Tingkat signifikan (α) yang digunakan sebesar 5%.
2. Pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat dilihat dari nilai signifikansi dengan kriteria: Jika $p\text{-value} > \alpha$ (5%) maka tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya jika $p\text{-value} < \alpha$ (5%) maka hipotesis berpengaruh signifikan.